

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dalam proses pendidikan dasar maupun keseharian mahasiswa pencinta alam universitas diponegoro masih ditemukan beberapa praktik tindak kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan simbolik dan penelantaran. Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh senior wapeala memiliki beberapa faktor yang lebih ditekankan pada penggunaan kekuasaan yang dimiliki. Senior wapeala menggunakan otoritas yang dimiliki untuk mempertahankan kekuasaan maupun mendapatkan loyalitas dari junior. Otoritas yang dimaksud meliputi otoritas kharismatik, otoritas tradisional, dan otoritas legal-rasional.

Dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki pada saat pendidikan dasar, senior wapeala merasa bebas untuk melakukan tindak kekerasan dengan dasar menciptakan anggota yang kuat secara fisik dan mental, apalagi notabene pendidikan Wapeala berada di tengah hutan yang jauh dari lingkungan warga. Kekerasan dalam Pendidikan dasar wapeala bukan lagi menjadi hal yang tabu bagi anggotanya dikarenakan hal ini telah dilakukan secara turun temurun dan menjadi budaya, dapat dikatakan telah menjadi apa yang disebut oleh Hannah arendt sebagai banalitas kekerasan.

Selain kekerasan langsung, pada saat proses pendidikan dasar terdapat sebuah kesalahan dalam proses pendidikan yang disebut oleh Paulo Freire sebagai

pendidikan gaya bank. Pendidikan dasar mahasiswa pencinta alam Wapeala Undip tidak membuka ruang dialog antara calon anggota dan anggota biasa dikarenakan proses Pendidikan dasar telah dibuat jauh hari sebelum proses Pendidikan dasar dimulai. Calon anggota dianggap sebagai masukan yatau wadah yang harus diisi sesuai dengan kebutuhan Wapeala, bukan dipandang sebagai suatu individu merdeka yang memiliki suatu kemampuan untuk dikembangkan.

Kekerasan tidak hanya berhenti setelah proses pendidikan dasar selesai, terdapat sebuah memoria passionis dari calon anggota yang telah menjadi anggota sehingga mereka masih takut untuk mengungkapkan apa yang ada didalam pikiran mereka karena terdapat tekanan dari para senior. Dalam kehidupan sehari-hari junior di wapeala terbiasa untuk diperbudak seperti menjadi pesuruh untuk membuat kopi, membersihkan sekretariat, dan lain-lain.

Proses pendidikan di Wapeala tidak berhenti pada saat calon anggota telah dilantik menjadi anggota biasa. Proses pendidikan yang awalnya hanya satu arah lambat laun berubah menjadi dua arah. Terjadi proses dialog antara senior dan junior, baik sesama anggota biasa maupun antara anggota biasa dengan anggota luar biasa. Disini anggota yang baru saja dilantik dilatih untuk mengemukakan pendapat melalui rapat kegiatan dan kepanitiaan. Setelah mereka melewati fase kepanitiaan, anggota baru diarahkan untuk menjadi pengurus harian agar mendapatkan lebih banyak pengalaman terkait keorganisasian.

Semua latar belakang diatas menyatu dengan pengalaman dari Anggota Wapeala yang memiliki nomor induk. Latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan kepentingan praktis memperkuat teori dari Antonio Gramsci dimana

hegemoni merupakan mata rantai kemenangan yang didapatkan melalui mekanisme konsesus dari pendindasan terhadap kelas sosial lainnya. Kelas sosial dalam wapeala adalah perbedaan antara senior dan junior atau anggota biasa dan masa bakti. Kekuasaan bagi Gramsci lebih dititikberatkan pada konsesus daripada kekerasan untuk melakukan pendindasan terhadap suatu kelas tertentu. Hegemoni bukanlah suatu hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.

Memperkuat pemikiran Paul Ricoeur, bahwa fenomenologi hermeneutika tidak hanya digunakan untuk menginterpretasikan teks saja, tetapi juga fenomena sosial didalamnya dimana pendidikan wapeala cenderung kearah represif, sehingga perlu dilakukan interpretasi dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan hermeneutika merupakan aktualisasi dari tradisi, budaya, bahasa dan sejarah.

Dalam praktik pendidikan Wapeala, tipe kekerasan dan kekuasaan yang digunakan dapat dikatakan bertingkat sesuai dengan tahapan pendidikan yang dilalui. Secara umum, kekerasan yang digunakan oleh wapeala hampir beda tipis dengan ketegasan dan latihan fisik. Akan tetapi, sudut pandang dari kebanyakan orang mengatakan bahwa apa yang dilakukan wapeala merupakan suatu bentuk dari kekerasan.

Penggunaan kekerasan dalam metode pendidikan dapat digunakan tergantung dari model pendidikan yang digunakan. Dalam model pendidikan gaya militer, kekerasan digunakan untuk mengekspresikan ketegasan dan hasil dari latihan fisik. seorang tentara tidak bisa berdiskusi dengan atasan melalui dialog

terbuka atau menggunakan ruang publik dikarenakan apa yang mereka lakukan berhubungan dengan kedaulatan sebuah negara dan nyawa banyak warga negara.

Dalam kasus pendidikan Wapeala, penggunaan kekerasan seperti push up, dibentak, perudungan, penelantaran, bahkan pemukulan digunakan untuk melatih individu menjadi insan yang lebih baik. Dalam kegiatan di alam terbuka, alam tidak akan memberikan belas kasihan kepada mereka yang lemah secara fisik dan mental. Hukuman yang diberikan senior berupa push up merupakan suatu bentuk latihan untuk kedisiplinan atas kesalahan yang dilakukan oleh junior. Dalam latihan mental, perudungan dan penelantaran merupakan media yang paling cocok untuk mensimulasikan keadaan di alam terbuka.

#### **4.2 Saran**

Untuk mengurangi tindak kekerasan yang terjadi pada saat proses pendidikan dasar maupun keseharian dari mahasiswa pencinta alam wapeala, diperlukan sebuah gerakan baru dari pelaku didalamnya. Seperti yang diungkapkan oleh Paulo Freire bahwa yang dapat menyelamatkan mereka yang tertindas adalah mereka yang pernah ditindas.

Sebenarnya pemerintah telah mengatur terkait kekerasan dan penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi, apabila korban tidak melaporkannya kepada aparat yang berwenang maka kasus-kasus kekerasan akan tetap berada dibalik layar dan ditelan oleh zaman. Pemerintah melalui aparatusnya yaitu institusi pendidikan seharusnya lebih mengawasi proses pendidikan agar tidak menyimpang terlalu jauh dari tujuan pendidikan itu sendiri. Baik para pelaku kekerasan maupun

korban hendaknya membaca referensi untuk melaksanakan sebuah proses pendidikan. Mereka tidak bisa hanya berpaku pada tradisi yang telah ada, hakikat dari sebuah ilmu adalah berkembang sesuai dengan zaman.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa turut serta dalam proses pendidikan adalah dengan pembentukan stigma di masyarakat terkait pendidikan. Kampanye melawan kekerasan dan perudungan dapat dilakukan melalui program pemerintah dengan melibatkan organisasi swasta, organisasi bisnis, maupun masyarakat.

Penggunaan kekuasaan punitif seperti skorsing bagi oknum maupun organisasi dapat dilakukan untuk menciptakan sebuah sistem dan struktur yang kondusif dalam proses pendidikan. Dengan adanya skorsing, baik oknum maupun organisasi akan mengintrospeksi diri agar proses pendidikan dapat menjadi lebih baik.